E-JURNAL AKUNTANSI TSM
Vol. 5, No. 2, Juni 2025, pp.243-254
Akreditasi Sinta 4 SK No. 177/E/KPT/2024

E-ISSN: 2775-8907
https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019-2023

SHANIA FAIRUZ
HENDI ROHENDI

Politeknik Negeri Bandung, Jl. Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Bandung, Indonesia
shaniafairuz06@gmail.com, hendirohendi@polban.ac.id

Received: July 10, 2025; Revised: July 14, 2025; Accepted: July 14, 2025

Abstract**:** *The effectiveness of local revenue (PAD) collection is very important for local governments to finance work programs in their regions and determine the level of regional independence. However, problems related to unachieved PAD are still found in various regions, one of which is Subang Regency. This study aims to measure the influence of the five dimensions of SPIP, both partially and simultaneously, on the effectiveness of PAD collection. The research method used is a quantitative method using a saturated sampling technique consisting of 11 OPDs collecting PAD and 52 respondents. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires, interviews, observations and data analysis and hypothesis testing using the SmartPLS 3 application. The results of this study indicate that partially the control environment, risk assessment, and monitoring influence the effectiveness of PAD collection, while risk assessment, information and communication do not influence the effectiveness of PAD collection. Furthermore, simultaneously SPIP has an influence on the effectiveness of PAD collection in Subang Regency.*

Keywords**:** *Control Activities, Control Environment, Information and Communication, Monitoring, PAD Effectiveness, Risk Assessment*

Abstrak: Efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai program kerja pada daerahnya dan menentukan tingkat kemandirian daerah. Akan tetapi, permasalahan terkait PAD yang tidak tercapai masih banyak ditemukan di berbagai daerah, salah satunya adalah Kabupaten Subang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kelima dimensi dari SPIP baik secara parsial maupun simultan terhadap efektivitas pemungutan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik sampling jenuh yang terdiri dari 11 OPD pemungut PAD dan 52 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara, observasi dan Analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan aplikasi SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan PAD, sedangkan penilaian risiko, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan PAD. Selanjutnya, secara simultan SPIP secara utuh memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Subang.

Kata kunci: Aktivitas Pengendalian, Efektivitas Pemungutan PAD, Informasi dan Komunikasi, Lingkungan Pengendalian, Pemantauan, Penilaian Risiko

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengatur urusan daerahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya asas otonomi daerah, pemerintah daerah harus melakukan Pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Pembangunan ini bisa terealisasi dengan cara memaksimalkan sumber pendapatan untuk menjalankan pembangunan tersebut. Pendapatan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang menentukan Tingkat kemandirian daerah, karena semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah maka menandakan rendahnya ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan dari pemerintah pusat (Patarai 2018:214).

Kendala terkait PAD yang tidak tercapai masih banyak ditemukan. Banyak daerah yang tidak dapat mencapai target pendapatan asli daerahnya sehingga menyebabkan bantuan dari pemerintah pusat meningkat. Berdasarkan data dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2024, Pendapatan asli daerah secara nasional mengalami penurunan dari tahun 2019. Penurunan persentase PAD ini bermula pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, yang mana persentase PAD di tahun 2020 hanya mencapai 80.41%. Permasalahan ini dialami juga oleh Kabupaten Subang, dimana selama lima tahun terakhir efektivitas pendapatan asli daerahnya mengalami penurunan dan kurang dari angka 90%. Diketahui bahwa pada tahun 2019 efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Subang berada di angka 97,80%, tetapi mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023 persentase efektivitas pendapatan asli daerahnya sudah mulai meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 80,30% menjadi 86,93%. Namun, angka ini masih tergolong kurang efektif karena kurang dari angka 90-100%. Hal ini menandakan bahwa rasio efektivitas PAD kabupaten Subang belum efektif.

Realisasi penerimaan PAD yang belum mencapai target ini menunjukkan belum optimalnya usaha Badan Pendapatan Daerah dan OPD pemungut PAD Kabupaten subang dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Tidak tercapainya rasio efektivitas PAD ini menandakan bahwa diperlukannya upaya untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PAD.

Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Subang adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pemimpin berperan sebagai pelayan yang mengutamakan kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Siladjaja et al. 2023:12).

SPIP dapat membantu meningkatkan kepatuhan pemerintah dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan meminimalisir terjadi pelanggaran (Alamri et al. 2024). sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel, karena SPIP memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan pemungutan pajak sehingga dapat terlaksana dengan baik (Suhara et al. 2023). SPIP berpengaruh dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan retribusi alat pemadam api ringan, karena setelah dijalankannya kelima unsur pengendalian internal terdapat pengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi alat pemadam api yang merupakan penerimaan asli daerah (Haryanti & Hendarsyah 2021). Sedangkan menurut Febro et al. (2024) yang menyatakan bahwa tidak semua unsur dalam SPIP berpengaruh secara parsial terhadap

efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2024) juga mengatakan bahwa hanya aktivitas pemantauan yang berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencapaian target realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Subang. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi teoritis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola pendapatan asli daerah Kabupaten Subang dan OPD pemungut PAD untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar dapat mencapai efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah dan presentasi realisasi target PAD dapat tercapai.

Teori Pemberi Laporan (*The Stewardship Theory)*

Teori ini berpendapat bahwa pimpinan yang bertindak sebagai steward memiliki sikap pro organisasi pada saat struktur manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasaan yang tinggi. Teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi Ketika para manajer tidak memiliki motivasi untuk mencapai tujuannya secara individu tetapi ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang saat para eksekutif sebagai “pelayan” (steward) termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan principal (Siladjaja et al. 2023:14)

Teori *Stewardship* menegaskan bahwa nilai-nilai integritas, kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalankan organisasi harus diutamakan dan diperhatikan baik bagi pemimpin organisasi maupun seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan teori ini memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari setiap keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan organisasi (Garna et al. 2024:49).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibuat berdasarkan pada kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dalam sebuah publik. Konsep SPIP ini resmi dijalankan di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang hingga kini dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di setiap instansi pemerintahan. SPIP terdiri dari lima indicator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dijelaskan bahwa yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Alur Pemungutan PAD

Pemungutan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek atau pajak, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang dikenai/terutang sampai dengan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan setoran. Definisi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak

daerah dan retribusi daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan lebih lanjut terkait rangkaian pemungutan diantaranya:

1. Penghimpunan data objek dan subjek retribusi atau pajak
2. Penentuan besarnya pajak atau retribusi.
3. Penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi
4. Pengawasan setoran

Efektivitas Pemungutan PAD

Pengukuran efektivitas menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas dibuat melalui tiga indikator yaitu pencapain tujuan, integrasi, dan adaptasi (Ambarwati & Dewi 2024).

1. Efektivitas dari segi pencapaian tujuan organisasi diukur berdasarkan sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Integrasi efektivitas juga dapat diukur melalui tingkat integrasi antar bagian dan anggota organisasi. Integrasi yang baik menunjukkan bahwa semua bagian organisasi bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.
3. Adaptif merupakan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal juga merupakan indikator efektivitas.

Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Efektivitas Pemungutan PAD

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari unsur pengendalian yang memberi acuan disiplin bagi para pemimpin maupun pengelola keuangan daerah (Hafsah & Loka 2021). Lingkungan pengendalian yang dijalankan instansi pemerintah dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat mencapai tujuan organisasi (Alamri et al. 2024). Apabila seluruh OPD menerapkan lingkungan pengendalian dengan baik maka pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik (Sandra 2021). Sehingga lingkungan pengendalian akan membawa dampak signifikan pada kinerja keuangan (Febro et al. 2024).

H_1: Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap Efektivitas Pemungutan PAD.

Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Efektivitas Pemungutan PAD

Mekanisme yang digunakan dalam penilaian risiko harus bisa mengenali yang berasal dari internal maupun eksternal (Haryanti & Hendarsyah 2021). Penilaian risiko diawali dengan menentukan tujuan atau target yang ingin dicapai (Hafsah & Loka 2021). Setelah tujuan dan program kerja telah ditetapkan maka dilakukan identifikasi atas risiko internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan program kerja tersebut (Alamri et al. 2024). Sehingga semakin baik penilaian risiko akan semakin baik juga pengelolaan keuangan daerah (Sandra 2021).

H_2: Penilaian risiko berpengaruh terhadap Efektivitas Pemungutan PAD.

Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Efektivitas Pemungutan PAD

Aktivitas pengendalian dilakukan untuk mengatasi risiko dan pelaksanaan program kerja agar berjalan dengan efektif (Hafsah & Loka 2021). Kegiatan pengendalian akan membantu mengurangi kesalahan, kecurangan, dan hal yang tidak efisien pada suatu instansi dalam menjalankan tugasnya (Febro et al. 2024). Sehingga, semakin baik penetapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur maka akan berjalan baik juga pengelolaan keuangan daerah (Sandra 2021).

H_3: Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Efektivitas Pemungutan PAD.

Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Efektivitas Pemungutan PAD

Informasi merupakan data yang diolah untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik (Hafsah & Loka 2021). Informasi yang berkualitas dan komunikasi yang baik akan membuat pengelolaan keuangan pemerintah berjalan dengan lancar dan sesuai (Sandra 2021).

H_4: Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Efektivitas Pemungutan PAD.

Pengaruh Pemantauan terhadap Efektivitas Pemungutan PAD

Pemantauan dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindak lanjuti untuk mencapai realisasi pendapatan (Hafsah & Loka 2021). Pemantauan pengendalian internal dilakukan dengan cara evaluasi kinerja di setiap level pimpinan untuk memastikan efektivitas kegiatan (Alamri et al. 2024).

Pemantauan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Sandra 2021). Sehingga, pemantauan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan asli daerah (Putra 2024).

H_5: Pemantauan berpengaruh terhadap Efektivitas Pemungutan PAD.

Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan komunikasi, pemantauan terhadap Efektivitas Pemungutan PAD

Pelaksanaan kegiatan harus ditetapkan konsisten sesuai dengan aturan, pendataan dilakukan secara rutin, SDM yang direkrut harus sesuai dengan tupoksi yang akan dikerjakan, perlu membuat teknik secara baku dan sesuai dengan peraturan pusat, serta melakukan pemantauan akan membuat penerimaan retribusi meningkat (Sandra 2021). Sehingga penerapan sistem pengendalian yang kokoh akan berhubungan langsung dengan perbaikan kinerja keuangan salah satunya adalah pemungutan PAD (Febro et al. 2024).

H_6: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan komunikasi, pemantauan terhadap Efektivitas Pemungutan PAD berpengaruh terhadap Efektivitas Pemungutan PAD.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan populasi penelitian terdiri dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Non probability dengan menggunakan sampling jenuh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau angket yang berisi kumpulan pernyataan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Selain menggunakan kuesioner dalam penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang diambil dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi untuk memperkuat jawaban dari hasil kuesioner agar hasil jawaban yang diperoleh lebih akurat.

Lingkungan Pengendalian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, lingkungan pengendalian diukur melalui kegiatan berikut:

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
e. Pendelegasian wewenang

f. Penyusunan dan penerapan yang sehat tentang pembinaan SDM
g. Perwujudan peran APIP yang efektif
h. Hubungan kerja yang baik dengan Instan Pemerintah Terkait.

Penilaian Risiko

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penilaian risiko yang wajib dilakukan pimpinan instansi pemerintah terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko sebagai pengukurannya.

Aktivitas Pengendalian

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa untuk memastikan arahan dari pimpinan instansi pemerintah telah terlaksana maka perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh instansi pemerintah antara lain:

a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
b. Pembinaan sumber daya manusia;
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d. Pengendalian fisik atas aset;
e. Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja;
f. Pemisahan fungsi;
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi diukur sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa komunikasi harus dijalankan dengan baik secara internal maupun eksternal, sehingga organisasi bisa mendapat informasi untuk pelaksanaan tanggung jawab internal.

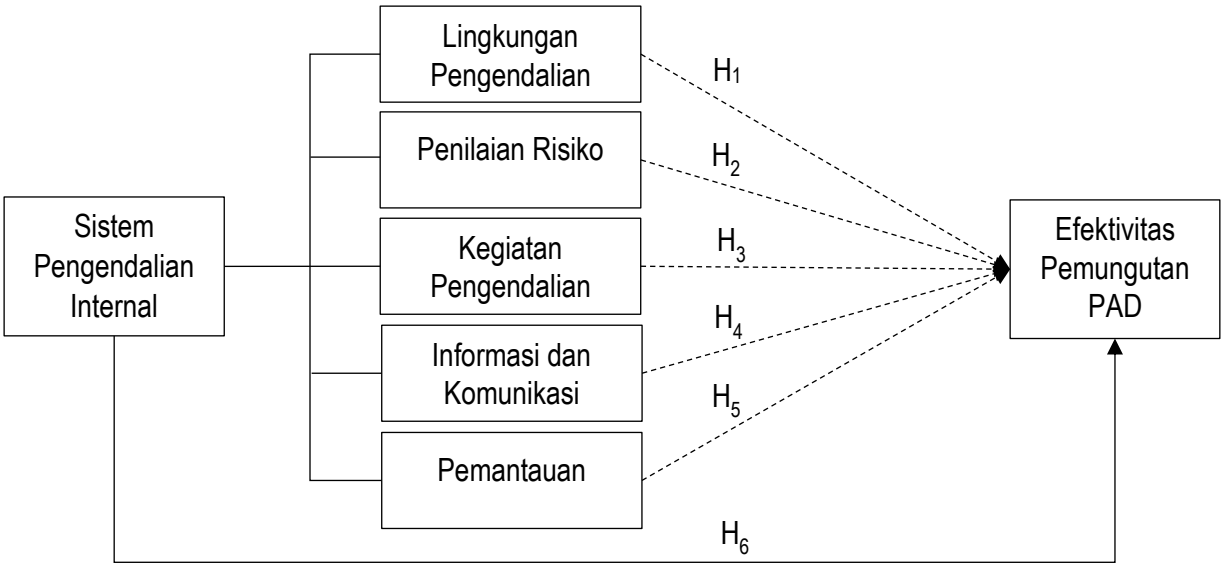

Gambar 1. Model Penelitian

Pemantauan

Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu yang diberikan dapat diperbaiki dan ditindaklanjuti. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemantauan pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Efektivitas Pemungutan PAD

Efektivitas pemungutan PAD diukur melalui pencapaian tujuan yang dilihat dari PAD yang tercapai dan pengelolaan PAD yang sesuai aturan. Integrasi dengan Melakukan penegakan hukum dan tindakan korektif terhadap ketidakpastian. Dan Adaptif , Responsivitas terhadap perubahan regulasi dan kondisi ekonomi.

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kuantitatif, adalah proses setelah data dari seluruh responden atau data lain terkumpul yang dilakukan dengan teknik analisis data menggunakan statistik. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Dalam aplikasi SmartPLS dilakukan dengan evaluasi model pengukuran *Outer Model* dan *Inner Model*. *Outer Model* terbagi menjadi validitas convergent, validitas discriminant, dan reliabilitas. Sedangkan Inner Model terdiri dari R-*Square,* nilai T dan P-*value.* Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen.

HASIL PENELITIAN

Hasil analis statistic data dengan menggunakan validitas convergen dapat dilihat pada tabel 1. Nilai *AVE* dari variable SPIP yang diwakili oleh X_1, X_2, X_3, X_4, dan X_5 memiliki nilai > 0.50, begitupun dengan variabel efektivitas pemungutan PAD bernilai 0,538 > 0,50. Besarnya variasi item dari setiap indikator variable X dan Y telah memenuhi syarat *convergent validity* yang baik karena secara keseluruhan nilai *AVE* variable > 0.50, sehingga dapat dikatakan valid.

Tabel 1. Hasil Validitas Convergent

	Average Variance Extracted (AVE)
X1_Lingkungan Pengendalian	0,674
X2_Penilaian Risiko	0,679
X3_Aktivitas Pengendalian	0,531
X4_Informasi dan Komunikasi	0,673
X5_Pemantauan	0,602
Y_Efektivitas Pemungutan PAD	0,538

Sumber: Hasil Pengolahan Data Smart PLS

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Discriminant dengan Fornell and Larcker

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
LP	0,821					
PR	0,507	0,824				
AP	0,617	0,507	0,728			
IK	0,458	0,276	0,255	0,820		
P	0,454	0,570	0,651	0,333	0,776	
EP PAD	0,605	0,364	0,714	0,199	0,602	0,733

Sumber: Hasil Pengolahan Data Smart PLS

Tabel 3. Hasil Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1_Lingkungan Pengendalian	0,879	0,912
X2_Penilaian Risiko	0,775	0,864
X3_Aktivitas Pengendalian	0,874	0,900
X4_Informasi dan Komunikasi	0,846	0,891
X5_Pemantauan	0,779	0,858
Y_Efektivitas Pemungutan PAD	0,857	0,891

Sumber: Hasil Pengolahan Data Smart PLS

Tabel 4. Hasil pengukuran R-square

	R Square	R Square Adjusted
Y_Efektivitas Pemungutan PAD	0,608	0,565

Sumber: Hasil Pengolahan Data Smart PLS

Hasil analisis statistic dengan mengukur validitas discriminant dapat dilihat pada tabel 2. Akar *AVE* untuk lingkungan pengendalian adalah (X_1) lebih besar korelasinya dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa discriminant validity untuk lingkungan pengendalian (X_1) telah terpenuhi. Begitupun dengan variabel X_2, X_3, X_4, X_5, dan Y memiliki nilai akar *AVE* yang lebih besar korelasinya dibanding dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat *discriminant validity* atau telah dikatakan valid.

Hasil pengujian statistik untuk mengukur reliabilitas model dapat dilihat pada tabel 3. Variabel SPIP diwakili oleh X_1, X_2, X_3, X_4, dan X_5 mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dan *composite reliability* > 0.70 yang menunjukkan bahwa setiap item yang mengukur SPIP telah konsisten/reliabel dalam mengukur SPIP. Begitupun dengan variabel Y yang bernilai > 0.70 yang menunjukkan bahwa setiap item yang mengukur efektivitas pemungutan PAD telah konsisten atau reliabel.

Hasil pengukuran *Inner Model* yang dilihat nilai R-*square* untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X pada variabel y, dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai *R square adjusted* adalah 0.565 yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan atau secara simultan sebesar 56%. Nilai tersebut tergolong ke dalam model moderat atau sedang karena berada dibawah 75%.

Hasil pengukuran *Inner Model* yang dilihat nilai T-*Value* untuk melihat adanya pengaruh variabel x pada y secara parsial dapat dilihat pada tabel 5. Pada tabel tersebut diketahui bahwa Lingkungan pengendalian mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan PAD sebesar 0,351 yang menunjukkan hubungan positif dengan t statistik (2,070 > 1,96) dan P value (0,039 < 0,05). , hal ini juga terjadi karena unsur-unsur lingkungan pengendalian yang diatur dalam peraturan tersebut, seperti penegakan integritas dan nilai etika membantu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan pembentukan struktur yang sesuai membantu setiap bagian menjalankan peran yang jelas dalam proses pemungutan PAD. Kepemimpinan yang Kondusif dalam mengkomunikasikan kendala dan mencerminkan pentingnya sistem pengendalian juga membantu organisasi untuk beradaptasi

Tabel 5. Hasil Uji Parsial T

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (|O/STDEV|)	P Values
X1 -> Y	0,351	0,33	0,17	2,07	0,039
X2 -> Y	-0,165	-0,145	0,123	1,342	0,18
X3 -> Y	0,41	0,414	0,186	2,206	0,028
X4 -> Y	-0,124	-0,086	0,145	0,858	0,391
X5 -> Y	0,312	0,312	0,132	2,368	0,018

Sumber: Hasil Pengolahan Data Smart PLS

dengan perubahan regulasi dan target PAD setiap tahunnya.

Penilaian risiko mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pemungutan PAD dengan orginal sampel sebesar 0,165, t statistik (1,342 <1,96) dan P value (0,180 > 0,05). Hal ini menjelaskan bahwa baik buruknya penilaian risiko tidak mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan PAD. Penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan instansi belum cukup untuk mengendalikan risiko yang terjadi terkait pemungutan PAD dalam mencapai target yang efektif.

Aktivitas pengendalian mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan PAD sebesar (0,410) yang menunjukkan hubungan yang positif dengan t statistik (2,206 > 1,196) dan P value (0,028 < 0,05). Hal ini terjadi karena aktivitas pengendalian seperti reviu kinerja dan pemisahan tugas dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi dan melakukan perbaikan untuk mencapai efektivitas pemungutan PAD yang baik.

Informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pemungutan PAD sebesar (-0,124) dengan t statistik (0,858<1,96) dan P value (0,391 > 0,05). Hal ini terjadi karena komunikasi dalam internal OPD masih kurang baik dan penyebaran informasi yang penting masih kurang merata yang dilihat dari hasil wawancara singkat di setiap OPD terkait SPIP yang tidak konsisten. Selain itu, penggunaan media informasi dan komunikasi pemungutan PAD masih kurang efektif digunakan karena kurangnya pemahaman dari objek pajak dan retribusi.

Pemantauan mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan PAD sebesar (0,312) yang menunjukkan hubungan positif dengan nilai t statistic (2,368>1,96) dan P value (0,018<0,05). Hal ini terjadi karena dalam pemungutan PAD, OPD pemungut selalu melakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan yang mendukung ketercapaian tingkat efektivitas pemungutan PAD.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan secara bersama-sama atau secara utuh yang biasa disebut dengan SPIP memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemungutan PAD. Semakin baik penerapan kelima dimensi dari SPIP pada suatu instansi maka akan semakin baik tingkat efektivitas pemungutan pendapatan asli daerahnya. Hal ini terjadi karena meskipun belum sempurna, setiap unsur dari kelima dimensi SPIP sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu memastikan integrasi antar bagian terlaksana dengan baik dan pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai, serta organisasi dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi karena adanya pengembangan SDM.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Lingkungan pengendalian, Aktivitas pengendalian, dan

Pemantauan berpengaruh positif terhadap efektivitas pemungutan PAD. Sedangkan Penilaian risiko, Informasi dan komunikasi tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemungutan PAD. Namun, secara simultan atau utuh kelima indikator SPIP memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemungutan PAD.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel yang hanya mencakup Badan, Dinas dan salah satu UPTD yang didisposisikan, sehingga tidak mencakup seluruh UPTD yang melakukan pemungutan PAD karena terkendala waktu dan biaya. Penelitian ini juga hanya berfokus pada variable SPIP tanpa mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pemungutan PAD. Oleh karena itu, kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang digunakan yaitu mencakup seluruh UPTD yang dibawahi dinas terkait agar bisa menggambarkan jawaban secara lebih menyeluruh terkait pengaruh SPIP pada efektivitas pemungutan daerah. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pemungutan PAD, seperti variabel moderasi kepatuhan wajib pajak dan peran good governance.

Selain itu, Kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemungut PAD Kabupaten Subang, diharapkan dapat meningkatkan lagi penilaian risiko terkait proses pemungutan PAD dengan cara melakukan pemetaan risiko secara menyeluruh agar potensi kendala dapat diatasi. OPD pemungut PAD juga harus meningkatkan lagi informasi dan komunikasinya agar tidak terjadinya ketimpangan informasi melalui cara memanfaatkan teknologi informasi dan proses pelatihan atau sertifikasi.

REFERENSI:

Alamri, S., Wuryandini, A. R., & Panigoro, N. (2024). Pengaruh GGG (Good Government Governance) dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemungutan Retribusi Sampah oleh Pemerintah Kota Gorontalo. *Economic Reviews Journal*, *3*(3). https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.209

Ambarwati, & Dewi, M. C. (2024). *Efektivitas Pemunguntan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Tahun 2020-2023*.

Febro, Z. R., Sam, I., & Tiswiyanti, W. (2024). Determinants of Internal Control Systems on the Financial Performance of Billboard Tax (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi). *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, *2*(5), 861–876. https://doi.org/10.55927/ijems.v2i5.11551

Garna, A. W. S., Mitariani, N. W. E., & Widnyani, N. M. (2024). *Kumpulan Teori Bisnis Perspektif Keuangan, Bisnis, dan Strategik*. PT Nilacakra Publishing House.

Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, *4*(1), 24–37. https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i1.6724

Haryanti, F., & Hendarsyah, D. (2021). Efek Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Retribusi Alat Pemadam Api Ringan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*(3), 553–562. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.902

Patarai, M. I. (2018). *Kinerja Keuangan Daerah* (2nd ed.). De La Macca.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).

Peraturan Pemeritantah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengndalian Intern Pemerintah (2008).

Putra, V. P. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris BAPENDA Kabupaten Sukabumi) Tahun 2019-2021*.

Sandra, R. (2021). *pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.* https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1277/884

Siladjaja, M., Prasetya, T. P. N., & Madgalena, P. (2023). *Teori Akuntansi Positif*. CV. Mega Press Nusantara. https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Akuntansi_Positif_Sebuah_Tinjauan/lUnoEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+akuntansi+positif&pg=PA17&printsec=frontcover

Suhara, Rustan DM, & Sjarlis, S. (2023). *Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Administrasi Pajak, dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar*. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.